

UPAYA PEMERINTAH MENYIAPKAN SDM KEARSIPAN MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

Sudiyanto¹

Abstract

The Professionalism and competence of Archivists can be obtained through formal education on archival science. This study is to determine the extent of the government's efforts in preparing and providing Human Resources of Archives through formal education on archival, as reflected in the opening of study program of archival science at various universities in Indonesia. Only 7 universities which opened study program of archival science or only 2.19% of the amount of state universities or only 0.17% of the total number of Universities in Indonesia. University which opened study program of archival still more at the diploma level. This study concluded that government support for the spirit of archival towards a better management through provision of formal education on archival are still lacking.

Keywords: *formal education on archival, archivists, competence, archival science.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengelola arsip adalah mengelola informasi. Mengelola arsip tidak hanya dituntut memahami dari segi fisiknya, tetapi mengelola arsip harus juga memahami dari segi *structure*, *content*, dan *context*-nya. Terlebih lagi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan arsip, sehingga dalam pengelolaannya memerlukan pengetahuan khusus di bidang kearsipan. Konsep, teori, dasar-dasar, dan prinsip-

prinsip kearsipan harus menjadi pijakan bagaimana suatu arsip dikelola. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki wawasan ilmu kearsipan agar SDM tersebut kompeten, mampu, dan terampil mengelola arsip dengan baik. Ilmu kearsipan berperan sebagai unsur kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip tanpa dilandasi dengan ilmu kearsipan akan menjadikan arsip kurang bermakna dan kurang memberikan manfaat, bahkan akan menjadi beban bagi institusi pengelolanya.

¹ *Arsiparis LAPAN*

Sejalan dengan pengelolaan arsip yang harus dilaksanakan berdasarkan keilmuan, pemerintah telah berupaya menunjukkan niat baiknya dengan telah membuka pendidikan formal jurusan/program ilmu kearsipan di berbagai perguruan tinggi. Pembukaan pendidikan formal ilmu kearsipan tersebut tentu untuk menyiapkan dan menyediakan SDM kearsipan yang kompeten dan profesional agar pengelolaan kearsipan di berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dapat dikelola dengan baik.

B. Rumusan Masalah

SDM kearsipan merupakan orang yang mengelola arsip sejak arsip diciptakan, digunakan, disimpan (inaktif), sampai menjadi arsip statis. Agar SDM kearsipan menjadi kompeten harus dibekali dengan pendidikan ilmu kearsipan yang cukup agar arsip yang dikelolanya dapat dimanfaatkan dan tertata dengan baik sebagai sumber informasi, bukti pertanggungjawaban dan kesejarahan. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyiapkan SDM kearsipan, maka permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "sejauh mana pemerintah telah menyiapkan SDM

kearsipan melalui pendidikan formal?"

C. Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam penyediaan pendidikan formal kearsipan melalui pembukaan program studi ilmu kearsipan di perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan dalam menyiapkan SDM kearsipan pada umumnya melalui pendidikan formal ilmu kearsipan.

D. Kerangka Teori

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU Nomor 20 tahun 2003). Darnelawati (1994), yang dikutip melalui <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/#ixzz2nmv9aGBi>, berpendapat bahwa "pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Tujuan pendidikan adalah untuk memperkaya budi pekerti,

pengetahuan, dan untuk menyiapkan seseorang agar mampu dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan tertentu".

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang terstruktur dan berjenjang dengan tujuan memperkaya budi pekerti, pengetahuan, dan untuk menyiapkan seseorang agar mampu dan terampil dalam bidang pekerjaan tertentu.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

Secara sederhana SDM, yang dikutip dari <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2124600-pengertian-sumber-daya-anusia/#ixzz2noGFzAGM> dapat diartikan sebagai "manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)". Dengan demikian SDM kearsipan dapat didefinisikan sebagai orang yang bekerja mengelola kearsipan di suatu organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa SDM kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang

kearsipan, arsiparis, dan fungsional umum di bidang kearsipan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pejabat struktural di bidang kearsipan merupakan tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen kearsipan.

Pengertian arsiparis menurut Undang Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam SDM Kearsipan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: 1). Pejabat struktural di bidang kearsipan; 2). Arsiparis; dan 3). Fungsional umum di bidang kearsipan. Namun dalam kajian ini lebih banyak menyoroti unsur yang ke-2 yaitu Arsiparis.

3. Kompetensi

Pengertian kompetensi yang dikemukakan Wibowo, 2007:86 (dalam Arie Pratama, dikutip 19 Desember 2013) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Mengacu pada pengertian tujuan pendidikan formal di atas, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sehingga kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal.

E. Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Hamid Darmadi (2013: 186) adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Data ketersediaan pendidikan formal program studi ilmu kearsipan yang ada di Indonesia dideskripsikan untuk menggambarkan upaya pemerintah dalam menyiapkan SDM Kearsipan.

II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peluang Kiprah Arsiparis dan Dukungan Lembaga

Arti pentingnya pengelolaan arsip bagi organisasi, institusi atau lembaga sering dikemukakan dan dibahas dalam berbagai kesempatan. Pentingnya pengelolaan arsip tersebut pada

dasarnya bertujuan agar arsip sebagai memori kolektif bangsa dapat tertata dengan baik, dapat dimanfaatkan secara maksimal, bernilai guna akuntabilitas dan bernilai guna kesejarahan. Oleh karena itu dibutuhkan SDM kearsipan yang profesional, mumpuni, dan bertanggung jawab atas kebenaran sejarah dengan menyelamatkan segala bentuk arsip, baik statis maupun dinamis. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan tidak dapat diisi oleh sembarang orang tetapi harus direncanakan, disiapkan, dan merupakan orang yang kompeten di bidangnya, bukan orang buangan (E.E. Mangindaan: 2011).

Disadari atau tidak profesi pengelola arsip (baca arsiparis) saat ini masih menjadi profesi dan jabatan (baca jabatan fungsional) yang belum menarik, belum ideal, banyak dicibir orang, bahkan masih terkesan dipandang "sebelah mata". Profesi arsiparis dapat sejajar dengan profesi lain (misalnya: peneliti, perekayasa, pranata komputer, dll.) bila ada sinergi antara kedua unsur, yaitu dari arsiparis itu sendiri dan adanya dukungan institusi/ lembaga tempat arsiparis bekerja. Unsur yang pertama dari sisi arsiparisnya, telah banyak regulasi yang diterbitkan pemerintah yang memberi

peluang arsiparis untuk eksis dan berperan ikut andil memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebut saja pada PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, suatu peraturan induk yang memayungi pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Indonesia, pada pasal 151 disebutkan bahwa arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Independen artinya arsiparis merupakan pekerjaan profesi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lagi menunggu pekerjaan dan perintah dari atasannya, tetapi dituntut untuk proaktif dan inovatif. Kemudian independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbebas dari unsur-unsur kepentingan dan tekanan dari pihak manapun (misalnya: atasan, partai politik, dll) sehingga konsep, teori, dan prinsip-prinsip kearsipan harus menjadi dasar pijakan bagaimana suatu arsip dikelola dengan semestinya.

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga memberikan peluang arsiparis untuk eksis. UU tersebut mengamanatkan bahwa

untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana wajib ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh penulis dengan judul "Peluang Arsiparis Menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)" dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab PPID sejalan bahkan ada beberapa poin yang sama dengan tugas yang diemban oleh arsiparis. Arsiparis dan PPID sama-sama melakukan penciptaan, penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan pelayanan informasi. Dengan demikian arsiparis dapat memainkan peran penting dalam rangka implementasi UU KIP, karena kompetensi pengelolaan informasi juga dimiliki oleh arsiparis. Informasi merupakan unsur content pada setiap arsip. Sehingga berbicara arsip tidak dapat dilepaskan dari informasi yang terkandung di dalamnya.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga memberikan peluang arsiparis untuk berkiprah dalam implementasinya, pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu lingkup pelayanan publik adalah informasi. Arsip sebagai sumber informasi merupakan objek yang

dilayankan kepada *user* dalam implementasi UU tersebut.

Contoh lain adalah ketika terjadi bencana, semua elemen bangsa (pemerintah, swasta, dan masyarakat) saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah, menyelamatkan jiwa manusia, dan menyelamatkan aset. Aset negara disamping berupa fisik seperti gedung, mobil, dan peralatan kantor, juga aset sebagai bukti akuntabilitas dan kesejarahan yang tidak dapat tergantikan yaitu yang bernama arsip. UU Kebencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 6 huruf g mengamankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. UU ini memberikan tugas kepada pemerintah bahwa dalam kondisi bencana maupun pasca bencana untuk memelihara arsip yang rusak akibat bencana tersebut. Hal ini sudah dilakukan oleh Arsip Nasional R.I. (ANRI) ketika terjadi banjir besar bulan Januari 2014 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya dengan melakukan layanan perbaikan arsip seperti ijazah dan sertifikat tanah yang rusak akibat banjir untuk masyarakat umum (Harian

Republika dan Media Indonesia, tanggal 29 Januari 2014). Oleh karena itu dalam kondisi terjadi bencana sekalipun peluang mulia ini dapat dimanfaatkan oleh arsiparis, termasuk arsiparis di daerah untuk mengabdikan perannya sesuai dengan profesinya, setidaknya untuk lingkup instansinya sendiri.

Beberapa contoh regulasi di atas membuka peluang arsiparis untuk lebih banyak berkiprah di berbagai kesempatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Tools* sekarang telah tersedia, hanya tinggal terpulang kepada arsiparis itu sendiri apakah akan memposisikan sebagaimana fungsinya yang dibutuhkan oleh institusinya sehingga fungsional arsiparis terangkat sejajar dengan fungsional lainnya atau hanya sekedar ada dan menjadi fungsional pada jajaran bawah.

Unsur yang *kedua*, dukungan institusi/ lembaga tempat arsiparis bekerja. Arsiparis dan pengelolaan kearsipan pada umumnya akan dapat berkembang bila ada dukungan dan komitmen dari lembaga. Lembaga yang menganggap penting dan menempatkan kearsipan pada tataran prioritas, bukan prioritas paling bawah, biasanya *output* kearsipannya akan baik. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup, pendanaan yang cukup, dan kesempatan

peningkatan pendidikan merupakan contoh wujud komitmen lembaga terhadap kemajuan kearsipannya. Diakui atau tidak masih ada instansi yang menempatkan pengelolaan kearsipannya pada urutan bawah. Contoh saja dalam pengangkatan SDM kearsipan, arsiparis diangkat dan direkrut dari unit kerja lain. Sangat jarang pengangkatan seorang arsiparis direkrut melalui perencanaan dari awal yang penempatannya memang diplot sebagai seorang arsiparis dengan latar belakang pendidikan formal kearsipan. Akan sangat berbeda *performance*-nya ketika implementasi di lapangan dimana orang yang mempunyai ilmu dan pengetahuan formal kearsipan dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan formal kearsipan dalam mengabdikan dirinya sebagai seorang arsiparis. Meskipun ada pula pendapat bahwa pengetahuan itu dapat

diperoleh tidak hanya dari pendidikan formal saja tetapi bisa melalui pelatihan. Dalam kaitan pendidikan formal bagi arsiparis, Richard J. Cox (1992: 7) berpendapat bahwa arsiparis yang mempunyai pendidikan formal kearsipan akan lebih profesional.

B. Ketersediaan Program Pendidikan Formal Kearsipan

Menjadi hal yang relevan untuk dipertanyakan sebenarnya seberapa jauh pemerintah dalam menyiapkan SDM kearsipan melalui pendidikan formal. Dengan kata lain apakah pemerintah sudah membuka program/jurusan kearsipan untuk mengimbangi keinginan pengelolaan arsip dengan baik? Berbicara mengenai pendidikan formal kearsipan berikut ini ditampilkan data perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu kearsipan.

Tabel 1: Tabel Data Perguruan Tinggi yang Membuka Program Studi Ilmu Kearsipan

NO.	PERGURUAN TINGGI	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	NEGERI/ SWASTA	KETERANGAN
1.	Universitas Indonesia	Perpustakaan	S2	Negeri	Terdapat peminatan Kearsipan
		Kearsipan	D3	Negeri	
2.	Universitas Terbuka	Kearsipan	D4	Negeri	
3.	Universitas Gadjah Mada	Kearsipan	D3	Negeri	
4.	Universitas Diponegoro	Kearsipan	D3	Negeri	
5.	Universitas Haluoleo	Perpustakaan dan Kearsipan	D3	Negeri	

NO.	PERGURUAN TINGGI	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	NEGERI/ SWASTA	KETERANGAN
6.	Universitas Negeri Padang	Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan	D3	Negeri	
7.	IAIN Imam Bonjol Padang	Perpustakaan (d/h. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi)	D3	Negeri	

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.evaluasi.dikti.go.id per tanggal 27 Desember 2013)

Bila kita cermati data di atas, mestinya ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu: jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan, jenjang yang tersedia, status perguruan tinggi, dan penyebarannya.

Dari segi jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan masih sangat sedikit jumlahnya, baru 7 perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi negeri yang ada saat ini berjumlah 321 (jumlah seluruhnya 323 dikurangi 2 yang telah dihapus) terdiri dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik. Bila dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang ada maka yang telah membuka program studi kearsipan hanya 2,19 %. Suatu angka yang masih sangat kecil. Persentasenya akan semakin kecil bila dibandingkan dengan jumlah seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk swasta, yaitu hanya

0,17 % (jumlah seluruh perguruan tinggi 4489 dikurangi 247 yang telah dihapus, alih fungsi, alih kelola, non aktif, dan tidak ada statusnya sehingga jumlah seluruh perguruan tinggi yang masih aktif adalah 4242).

Jenjang atau strata yang ditawarkan juga belum menunjukkan dukungan dunia pendidikan terhadap kearsipan. Dari 7 perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan baru 1 yang berjenjang S2 (Universitas Indonesia) itupun di bawah bendera ilmu perpustakaan yang membuka konsentrasi atau peminatan kearsipan, 1 berjenjang D4, dan 6 berjenjang D3. Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal kearsipan paling banyak masih pada tataran jenjang Diploma, sementara untuk jenjang S1 belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan. Data di atas juga menunjukkan bahwa ketersediaan pendidikan formal

kearsipan ada loncatan strata, artinya dari jenjang diploma langsung ke jenjang S2 tanpa ada jenjang S1.

Dari sisi sebaran atau lokasi perguruan tinggi yang telah membuka program studi kearsipan masih belum merata. Dari segi lokasi, 3 perguruan tinggi berlokasi di pulau Jawa, 2 di pulau Sumatera, 1 di pulau Sulawesi, dan 1 merupakan perguruan tinggi yang dari segi lokasi ada di seluruh Indonesia (Universitas Terbuka). Dengan demikian di beberapa pulau besar seperti Kalimantan, Papua, Bali, dan Maluku belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan. Bila dikelompokkan menurut pembagian wilayah Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur), masih didominasi oleh Wilayah Indonesia Bagian Barat (5 perguruan tinggi), 1 perguruan tinggi berada di Wilayah Indonesia Bagian Tengah, 1 merupakan perguruan tinggi yang dari segi wilayah ada di seluruh Indonesia (Universitas Terbuka). Dengan demikian ada satu wilayah yang belum ada program studi kearsipannya yaitu Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Satu hal lagi yang cukup menarik adalah dari ke-7 perguruan tinggi yang membuka program studi kearsipan, semuanya merupakan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi milik pemerintah. Sementara tidak satupun perguruan tinggi swasta yang membuka program studi kearsipan. Ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa lembaga pendidikan swasta tidak/belum ada yang membuka program studi kearsipan, apakah kurang peminatnya sehingga tidak menguntungkan dari sisi bisnis atau ada hal-hal lain.

C. Ketersediaan Program Pendidikan Formal Perpustakaan (Sebagai Perbandingan)

Sebagai perbandingan mari kita melihat sejenak ke tetangga terdekat, artinya suatu ilmu yang selama ini dianggap satu rumpun meskipun sebenarnya banyak perbedaan, yaitu program studi ilmu perpustakaan yang telah dibuka oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air, baik negeri maupun swasta, berikut ini:

Tabel 2: Tabel Data Perguruan Tinggi yang Membuka Program Studi Ilmu Perpustakaan

NO.	PERGURUAN TINGGI	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	NEGERI/ SWASTA	KETERANGAN
1.	Universitas Indonesia	Perpustakaan	S2	Negeri	Terdapat peminatan Kearsipan
			S1	Negeri	
2.	Universitas Sumatera Utara	Perpustakaan	S1	Negeri	
			D3	Negeri	
3.	Universitas Airlangga	Informasi dan Perpustakaan	S1	Negeri	
		Perpustakaan	D3	Negeri	
4.	Universitas Padjadjaran	Perpustakaan	S1	Negeri	
5.	Universitas Diponegoro	Perpustakaan	S1	Negeri	
		Perpustakaan dan Informasi	D3	Negeri	
6.	Universitas Sam Ratulangi	Perpustakaan	S1	Negeri	
		Perpustakaan	D3	Negeri	
7.	Universitas Terbuka	Perpustakaan	S1	Negeri	
		Perpustakaan	D2	Negeri	
8.	Universitas Pendidikan Indonesia	Perpustakaan dan Informasi	S1	Negeri	
9.	Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan	Perpustakaan	S1	Swasta	
10.	Universitas Yarsi	Perpustakaan	S1	Swasta	
11.	Universitas Islam Nusantara	Perpustakaan	S1	Swasta	
12.	Universitas Kristen Satya Wacana	Perpustakaan	S1	Swasta	
13.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Perpustakaan	S1	Swasta	
14.	Universitas Lancang Kuning Riau	Perpustakaan	S1	Swasta	
15.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Perpustakaan	S1	Negeri	
16.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Perpustakaan	S1	Negeri	
17.	Universitas Islam Negeri Alauddin	Perpustakaan	S1	Negeri	
18.	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Perpustakaan	S1	Negeri	
19.	IAIN Ar-raniry	Perpustakaan	S1	Negeri	
		Perpustakaan	D3	Negeri	
20.	Universitas Gadjah Mada	Perpustakaan	D3	Negeri	
21.	Universitas Udayana	Perpustakaan	D3	Negeri	
22.	Universitas Lampung	Perpustakaan	D3	Negeri	
23.	Universitas Sebelas Maret	Perpustakaan	D3	Negeri	
24.	Universitas Haluoleo	Perpustakaan dan Kearsipan	D3	Negeri	
25.	Universitas Bengkulu	Perpustakaan	D3	Negeri	
26.	Universitas Negeri Padang	Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan	D3	Negeri	
27.	Universitas Negeri Malang	Perpustakaan	D3	Negeri	
28.	Universitas Pendidikan Ganesha Bali	Perpustakaan	D3	Swasta	

NO.	PERGURUAN TINGGI	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	NEGERI/SWASTA	KETERANGAN
29.	Universitas Muhammadiyah Mataram	Perpustakaan	D3	Swasta	
30.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Perpustakaan	D3	Negeri	
31.	IAIN Imam Bonjol Padang	Perpustakaan (d/h. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi)	D3	Negeri	
32.	IAIN Raden Fatah Palembang	Perpustakaan	D3	Negeri	
33.	IAIN Antasari Banjarmasin	Perpustakaan	D3	Negeri	
34.	STISIP Petta Baringeng Soppeng	Perpustakaan	D2	Swasta	

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.evaluasi.dikti.go.id diakses tanggal 27 Desember 2013)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan sudah cukup banyak, jenjang atau strata juga cukup bervariasi (dari D2, D3, D4, S1, sampai dengan S2), persebarannya cukup merata (ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Bali, dan Mataram/NTB), dan dari 34 perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan 9 di antaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Hal ini juga dapat dikaji lebih lanjut mengapa sepertinya program ilmu perpustakaan lebih menarik daripada program studi ilmu kearsipan. Sementara, tanpa bermaksud menganggap kepastakaan lebih rendah dari kearsipan, di setiap institusi atau lembaga dalam melaksanakan kegiatannya selalu menghasilkan arsip sedangkan perpustakaan belum tentu ada.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyediaan pendidikan formal kearsipan sebagai instrumen untuk mengangkat arsiparis menjadi tenaga SDM yang kompeten dan profesional masih dirasakan kurang. Semangat untuk mengelola kearsipan menjadi lebih baik lagi belum diimbangi dengan pembukaan program studi ilmu kearsipan yang cukup oleh dunia pendidikan sebagai wujud upaya penyiapan dan penyediaan SDM kearsipan yang memiliki ilmu dan pengetahuan kearsipan.

Menyikapi kondisi di atas, disarankan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebagai instansi penanggung jawab kearsipan nasional, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, untuk terus mendorong meningkatkan penyediaan pendidikan formal

kearsipan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- EE. Mangindaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Jangan Remehkan Arsip*, dalam Majalah Arsip: Media Kearsipan Nasional, Edisi 55, ANRI, Tahun 2011.
- Hamid, Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Konsep Dasar dan Implementasi*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Media Indonesia, *Korban Banjir Gratis Perbaiki Arsip*, terbitan 29 Januari 2014.
- Republika, *ANRI Perbaiki Arsip Korban Banjir*, terbitan 29 Januari 2014.
- Richard J. Cox, *Managing Institutional Archives: Foundational Principles and Practices*, USA: Greenwood Press, 1992.
- Sudiyanto, *Peluang Arsiparis Menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*, 2014.
- Darnelawati, *Seri Pustaka Teknologi Pendidikan Nomor 12*, Jakarta, 1994, dalam <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/#ixzz2nmv9aGBi>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*, (www.evaluasi.dikti.go.id diakses tanggal 27 Desember 2013)
- Pratama, Arie, dkk., *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Indo Stationery Ritel Utama Cabang Samarinda*, http://journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi_ilmiah/article/download/59/54
- <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2124600-pengertian-sumber-daya-manusia/#ixzz2noGFzAGM>